

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Demokrasi merupakan salah satu prinsip dari penyelenggaraan negara yang dipilih oleh bangsa Indonesia. Demokrasi adalah wujud pengakuan konstitusional bahwa kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat. Merujuk prinsip tersebut, pemerintahan negara pada hakikatnya adalah pemerintahan rakyat yang dibentuk dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat.¹ Salah satu wujud demokrasi adalah dengan membutuhkan partisipasi dari masyarakat dalam bentuk Pemilihan Umum (Pemilu). Seluruh masyarakat dalam negara demokrasi dapat memberikan pilihannya tanpa adanya hambatan dalam aspek apapun.

Pemilu merupakan salah satu bentuk dan cara yang paling nyata dalam melaksanakan negara demokrasi. Jika demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, maka cara rakyat untuk menentukan pemerintahan dilakukan melalui Pemilu. Pemilu diperlukan sebagai bentuk dari kedaulatan rakyat. Dengan dilaksanakannya Pemilu, rakyat bukan hanya memilih orang-orang yang menjadi wakilnya dalam menyelenggarakan negara, tetapi juga memilih program yang akan menjadi kebijakan negara pada pemerintahan berikutnya. Sehingga tujuan Pemilu adalah terpilihnya wakil rakyat dan terselenggaranya pemerintahan yang sesuai dengan keinginan rakyat.²

¹ Amin Ibrahim. 2013. *Dinamika Politik Lokal*. Bandung: Mandar Maju. Hlm 85.

² Janedri M Gaffar. 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press. Hlm. 44.

Pemilu merupakan tempat persaingan dalam memenuhi posisi-posisi kekuasaan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat.³ Pemilu merupakan sebuah sistem yang terdiri dari berbagai proses yang saling berinteraksi. Hasil yang dihasilkan dari Pemilu merupakan bagian penting dari sistem tersebut, yang membutuhkan pengakuan atau legitimasi dari rakyat sebagai sumber kekuasaan. Melalui Pemilu, akan ditentukan apakah suatu negara berhasil mencapai tujuan demokrasi seperti kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, atau sebaliknya.

Selain itu, Pemilu merupakan mekanisme transfer kekuasaan politik yang digunakan oleh masyarakat untuk menyatakan kedaulatannya. Konsep kedaulatan rakyat ini mengimplikasikan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat, dan rakyat pula yang menentukan cara dan bentuk penyelenggaraan pemerintahan. Hal yang sama berlaku untuk pemilihan umum legislatif yang jelas tertuang dalam konsep kedaulatan rakyat. Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa "Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali".⁴

Pemilihan legislatif adalah salah satu bentuk dan mekanisme dalam demokrasi yang mengatur prosedur agar seseorang dapat dipilih sebagai anggota

³ Sigit Pamungkas. 2009. *Perihal Pemilu*. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gajah Mada. Hlm. 3.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E ayat 6 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

dewan perwakilan rakyat. Pemilihan legislatif semacam ini bertujuan agar terpilihnya wakil-wakil rakyat yang benar-benar dipilih oleh rakyat, berasal dari rakyat dan akan bekerja untuk kepentingan rakyat. Di samping itu untuk meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi, mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, serta menciptakan akuntabilitas dan mekanisme *check and balance* di semua lembaga negara guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjamin tata kelola negara yang baik.

Dalam sebuah penyelenggaraan Pemilihan legislatif tentunya tidak terlepas dari peranan tokoh elit dalam memenangkan kandidat calon legislatif. Vifredo Pareto menjelaskan bahwa yang disebut dengan elit politik adalah sekelompok individu yang memiliki kualitas terbaik yang dapat menjangkau kekuasaan sosial politik. Elit merupakan orang-orang yang berhasil dan mampu menduduki jabatan tertinggi di lapisan masyarakat. Pareto mempertegas bahwa elit yang tersebar pada sektor pekerjaan yang berbeda pada umumnya berasal dari kelas yang sama, yakni orang-orang yang pandai. Pareto menggolongkan masyarakat ke dalam dua kelas lapisan atas (*elite*) dan lapisan bawah (*non elite*). Lapisan atas suatu kelas elit terbagi ke dalam dua kelompok yakni, elit yang memerintah (*governing elite*) dan elit yang tidak memerintah (*non governing elite*).⁵ Elit lokal politik merupakan seseorang yang memiliki jabatan politik atau kekuasaan melalui proses politik yang demokratis di tingkat lokal. Mereka menduduki jabatan politik di tingkat lokal dan membuat kebijakan serta menjalankan kepemimpinan atau kekuasaan politik. Sedangkan elit lokal non

⁵ Usman Kolip dan Elly M. Setiadi. 2013. *Pengantar sosiologi politik*. Kencana Prenadamedia Group. Hlm. 40-41

politik adalah seseorang yang menduduki jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elit lokal non politik seperti: elit keagamaan, elit tradisional organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, profesi dan sebagainya.⁶

Elit lokal memiliki peranan penting dalam konstestasi Pemilu mulai dari tingkat kabupaten atau kota maupun provinsi. Laswell menjelaskan elit lokal merupakan individu-individu yang meraih nilai-nilai tertinggi di dalam masyarakat dengan kecakapannya terlibat dan secara aktif dalam mengambil kebijakan.⁷ Elit lokal sebagai individu yang memegang peranan penting dalam mengambil keputusan politik pada tataran lokal.⁸ Keputusan elit lokal tidak hanya untuk menentukan serta membuat kebijakan untuk kepentingan daerahnya saja, namun terdapat beberapa keputusan dalam mendukung dan menentukan calon legislatif yang akan menyuarakan aspirasi serta kepentingan masyarakat.

Elit lokal mempunyai peranan penting dalam menentukan dukungan terhadap calon legislatif, hal tersebut menjadi referensi bagi masyarakat dalam memilih pemimpin yang dianggap tepat dan mampu memberikan kemajuan bagi daerahnya. Oleh karenanya, elit memiliki peran dalam kontestasi Pemilu dengan cara memahami bagaimana figur dan kriteria calon yang cocok dipilih menjadi pemimpin di daerah mereka. Keputusan elit lokal dalam menentukan dukungan terhadap calon kandidat cukup vital, sehingga hal seperti itu dianggap layak untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat yang berdampak terhadap

⁶ S.P. Varma. 1987. *Teori Politik Modern*. Jakarta: Rajawali Pres. Hlm. 203

⁷ Miriam Budiarto. 1991. *Aneka pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta Hlm. 3.

⁸ Amrianto. 2014. *Peranan Elit Tradisional Dalam Dinamika Politik Lokal Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Wakatobi*. FISIP Universitas Lambung Mangkurat Hlm. 4.

pembangunan daerah. Oleh sebab itu, elit yang ikut berperan dalam kontestasi Pemilihan legislatif setiap priodenya harus membaca seperti apa figur dan kriteria kandidat yang dianggap patut untuk dipilih untuk mewakili dan menyuarakan aspirasi daerah mereka di pemerintahan.

Menurut Suzanne Keller elit lokal merupakan individu yang memegang peran penting atau kelompok yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan. Elit lokal merujuk kepada individu-individu yang berhasil memperoleh posisi kepemimpinan berdasarkan adat istiadat, pewarisan, atau budaya lama yang memiliki pengaruh berdasarkan tradisi, keluarga, dan agama. Dalam suatu kelompok masyarakat, terdapat beberapa individu yang memiliki pengaruh atau peran yang kuat, dan mereka-lah yang disebut sebagai elit.⁹ Dalam konteks masyarakat modern, lebih lanjut Suzanne Keller memberikan pandangan yang mengacu pada elit strategis. Dalam masyarakat modern, terdapat individu-individu yang menonjol dibandingkan dengan yang lainnya karena memiliki keahlian atau keunggulan di bidang tertentu. Elit strategis ini mencakup elit politik, militer, pendidikan, agama, filsafat, ekonomi, pengetahuan, kesusastraan, dan kesenian. Beragam jenis elit ini menunjukkan bahwa kekuasaan dalam masyarakat modern terdapat dalam berbagai dimensi. Secara umum, mereka memegang kekuasaan dalam kelas-kelas tertentu di masyarakat.¹⁰

Selanjutnya Pareto dan Mosca menjelaskan bahwa setiap masyarakat tradisional dan modern dapat dijumpai kelompok individu mayoritas yang dapat

⁹ Keller, Suzanne. 1995. *Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan Elit-Penentu Dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Hlm. 3.

¹⁰ Haryanto. 2009. Elit Politik Lokal dalam Perubahan Sistem Politik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 13 (2). Hlm. 5.

menggerakkan masyarakat menjadi dua lapisan, kelompok elit dan kelompok yang tidak termasuk ke dalam kelompok elit (*non elite*). Mereka yang termasuk ke dalam elit yang sedang memerintah terdiri dari individu-individu yang menduduki jabatan-jabatan politis. Kemudian mereka yang berada di elit yang tidak memerintah tidak menduduki jabatan politis, akan tetapi memiliki kemampuan dalam mempengaruhi secara langsung proses pembuatan kebijakan. Ditambahkan Laswell, elit politik termasuk orang yang memegang kekuasaan secara keseluruhan dalam suatu bangunan politik. elit ini terdiri dari mereka yang berhasil mencapai kedudukan dominan dalam sistem politik serta kehidupan masyarakat. Mereka memiliki kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan.¹¹

Elit lokal memiliki peran yang sangat besar, posisinya sebagai agen informal dalam proses demokrasi dan didukung oleh keunggulan yang dimiliki oleh elit lokal yaitu modal sosial. Elit lokal diartikan sebagai seseorang atau kelompok yang dianggap mempunyai kecakapan dalam memberikan arahan serta pemahaman kepada masyarakat mengenai bagaimana proses demokrasi. Salah satu bentuk dalam mewujudkan demokrasi adalah dengan dilaksanakannya Pemilihan legislatif secara langsung yang menciptakan adanya regulasi pemimpin secara teratur hingga terwujudnya pergantian secara teratur. Dalam pelaksanaan Pemilihan legislatif membutuhkan dukungan dari berbagai elemen, salah satunya dari elit lokal dalam membentuk proses konsolidasi pada proses demokrasi. Fungsi elit lokal dalam sosialisasi di daerah menjadi sangat penting karena posisinya yang sangat strategis.

¹¹ Tom B. Bottomore dan Madan G.Gandhi dalam buku Haryanto. 2017. *Elit, Massa, dan Kekuasaan: Suatu Bahasan Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit PolGov. Hlm. 45.

Keterlibatan elit lokal pada Pemilihan legislatif didorong oleh berbagai alasan seperti karena kinerja beberapa petahana yang kurang memuaskan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat selama satu periode kepemimpinan. Selain itu perilaku anggota legislatif yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Kemudian tidak adanya koordinasi dan terjadinya disharmonisasi hubungan antara legislatif dengan kepala daerah atau *stakeholder* yang seharusnya dilibatkan dalam proses formulasi kebijakan daerah, namun terabaikan karena beberapa kepentingan lain.

Sehingga hal tersebut yang mendorong elit lokal mengambil peranan penting dalam Pemilihan legislatif untuk memenangkan kandidat calon yang mendukung kepentingan rakyat, seperti yang terjadi di Nagari Paninggahan pada Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Pemilihan legislatif DPRD Kabupaten Solok Tahun 2019. Sebanyak 8 dari 10 orang Calon legislatif DPRD yang berasal dari Kecamatan Junjung Sirih, dimana 9 orang Calon legislatif tersebut merupakan individu masyarakat yang berdomisili di Nagari Paninggahan ikut bertarung dalam memperebutkan suara rakyat yang ada di Dapil 2 Kabupaten Solok. Berikut nama-nama Calon legislatif DPRD Kabupaten Solok yang berasal dari Kecamatan Junjung Sirih berdasarkan Partai pengusung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Daftar Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Solok
dari Kecamatan Junjung Sirih

No	Nama calon	Partai Politik
1	Suardi Syam	Gerindra
2	Nurhaida	PDI P
3	Nursian	Golkar
4	Armen Plani	Nasdem
5	Nasar Bakri	PKS
6	Alwis Dt Bungsu	Hanura
7	Dodi Hermen	Hanura
8	Harison Dt Rajo Mudo	Demokrat
9	Arlis Rusman	Partai Bulan Bintang
10	Edi Sumanto	PAN

Sumber : Data Sekunder KPUD Kabupaten Solok

Berdasarkan data pada Tabel 1.1, terlihat tingginya antusiasme dan minat masyarakat dari Nagari Paninggahan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Solok pada Pemilihan legislatif Tahun 2019. Selain itu, tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat anggota DPRD Kabupaten Solok yang berhasil terpilih kembali untuk bertarung pada periode keduanya dalam Pemilihan legislatif Tahun 2019. Dengan melihat data keseluruhan pada Tabel 1.1, khususnya di Nagari Paninggahan, tergambar dengan jelas betapa ketat dan sengitnya persaingan dalam memperebutkan kursi DPRD Kabupaten Solok periode 2019-2024. Banyaknya Calon legislatif yang berasal dari Nagari Paninggahan yang mendaftarkan diri untuk bertarung dalam pemilihan anggota DPRD tersebut telah menarik perhatian khusus dari para elit lokal dalam menjalankan peran mereka untuk menentukan pilihan pada Pemilihan legislatif Tahun 2019 di Nagari Paninggahan.

Fenomena yang terjadi pada Pemilihan legislatif Tahun 2019 di Nagari Paninggahan adanya keterlibatan elit lokal dalam proses politik praktis. Salah satu

indikasi keterlibatan tersebut terlihat melalui acara kampanye terbuka yang melibatkan elit lokal Paninggahan. Pada pelaksanaan kampanye terdapat elit lokal yang menyatakan dukungan terhadap Armen Plani untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Solok periode 2019-2024. Hal tersebut berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) Paninggahan, Yefri Hendri bergelar Datuk Nan Rancak, saat berlangsungnya acara kampanye terbuka yang diadakan oleh tim sukses Armen Plani di Nagari Paninggahan. Pada saat memberikan orasi, elit lokal tersebut mengimbau anak kemenakannya untuk memberikan dukungan dan memilih calon legislatif nomor urut satu dari partai Nasdem, yaitu Armen Plani.¹²

Selain itu, Yefri Hendri Datuk Nan Rancak menyatakan kesiapan mereka untuk mengawal dan mendukung Armen Plani agar dapat duduk di Rumah Bagonjong DPRD Kabupaten Solok. Himbauan ini tidak hanya disampaikan di satu titik lokasi kampanye terbuka saja, tetapi juga di tempat lain secara berulang. Menariknya, terdapat kalimat ajakan yang menjadi daya tarik dan pusat perhatian bagi masyarakat yang hadir pada acara kampanye terbuka tersebut. Kalimat tersebut adalah "*Sumua digali aie datang*" (sumur digali air datang), yang merupakan sebuah kiasan dalam bahasa Minang yang bermakna bahwa sesuatu yang diharapkan akan segera terwujud.¹³

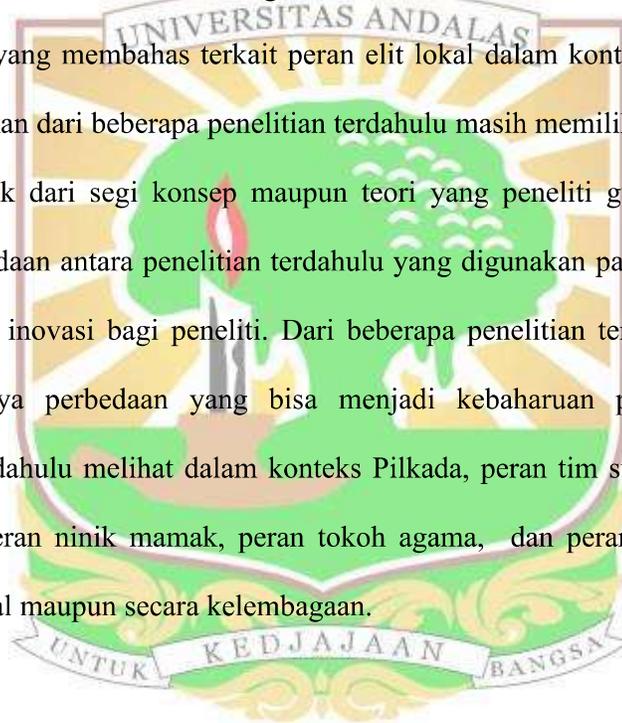
Maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa hadirnya Armen Plani sebagai calon anggota DPRD diharapkan akan membawa perubahan yang positif bagi Nagari Paninggahan. Dengan menggunakan kiasan tersebut, elit adat

¹² Putusan Pengadilan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Slk.

¹³ *Ibid.* Hlm 22.

berusaha menyampaikan keyakinan bahwa kehadiran Armen Plani akan membawa berkah dan manfaat seperti air yang datang dari sumur yang telah digali. Harapan ini mengandung makna bahwa dukungan mereka kepada Armen Plani diharapkan akan mewujudkan perubahan yang diinginkan bagi masyarakat Nagari Paninggahan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Amrianto¹⁴, Indra Kardian¹⁵, Muhammad Samin¹⁶, Olga Dara Monica¹⁷, dan Rahmad Fadhilah dan Ubaidullah¹⁸ yang membahas terkait peran elit lokal dalam kontestasi Pemilihan Umum. Rujukan dari beberapa penelitian terdahulu masih memiliki hubungan dan kemiripan baik dari segi konsep maupun teori yang peneliti gunakan. Peneliti melihat perbedaan antara penelitian terdahulu yang digunakan pada penelitian ini yang menjadi inovasi bagi peneliti. Dari beberapa penelitian terdahulu, peneliti melihat adanya perbedaan yang bisa menjadi kebaruan penelitian. Pada Penelitian terdahulu melihat dalam konteks Pilkada, peran tim sukses, peran elit tradisional, peran ninik mamak, peran tokoh agama, dan peran elit lokal baik secara personal maupun secara kelembagaan.



¹⁴ Amrianto. 2014. *Peranan Elit Tradisional Dalam Dinamika Politik Lokal Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Wakatobi*. FISIP Universitas Lambung Mangkurat Hlm. 4.

¹⁵ Indra Kardian. 2017. Peran Elit Tradisional Dalam Mendukung Pasangan Calon Independen M. Ramlan Nurmantias Dan Irwandi Pada Pilkada Kota Bukittinggi Tahun 2015. *Skripsi*. Padang: FISIP UNAND. Hlm. 78.

¹⁶ Muhammad Samin. 2020. Peran Elite Lokal dalam Upaya Memenangkan Pasangan Sutan Riska-Amrizal DT Rajo Medan pada Pilkada Kabupaten Dharmasraya Periode 2015-2020 oleh Muhammad Samin Tahun 2020. *Tesis*. Padang: FISIP UNAND. Hlm. 169.

¹⁷ Monica, O. D. (2022). Peran Tim Sukses Dalam Pemenangan Jefri Masrul pada Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*. Hlm. 42-55.

¹⁸ Ubaidullah, M. A., & Ahmady, I. 2022. Peran Tokoh Agama Dalam Membangun Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Pemilu 2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 7(1). Hlm. 5.

Penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti saat ini melihat dalam konteks Pemilihan legislatif dengan mendeskripsikan bentuk peran, proses konsolidasi serta kolaborasi seluruh elit lokal Nagari Panningahan yang terlibat dalam proses kemenangan Armen Plani. Selain itu, penulis juga akan mengkaji bagaimana dinamika yang terjadi antar elit lokal, sehingga seluruh elit yang ada di Nagari Panningahan memiliki visi yang sama untuk mendukung Armen Plani pada Pemilihan legislatif serentak tahun 2019. Keterbatasan ruang lingkup kajian penelitian sebelumnya yang nantinya menjadi pembeda dari hasil temuan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini.

1. 2 Rumusan Masalah

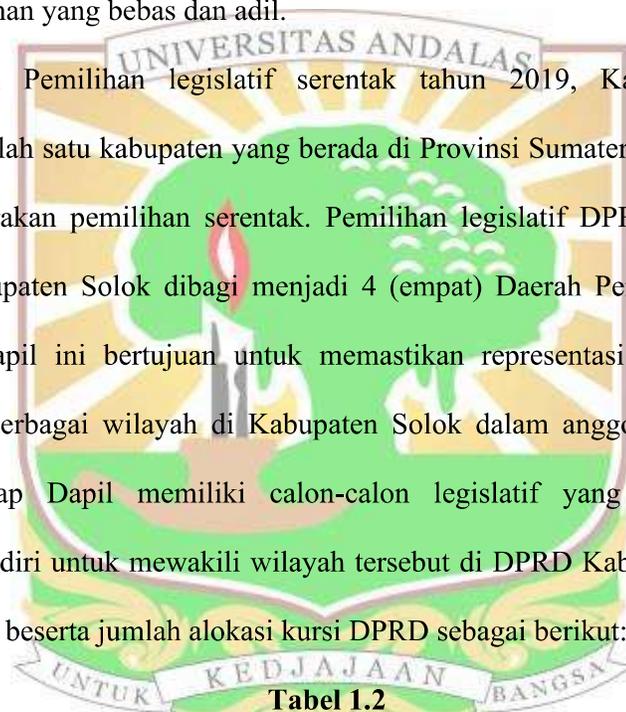
Pemilihan Umum legislatif tahun 2019 telah berhasil dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota, 7.201 Kecamatan, dan 83.404 kelurahan. Pelaksanaan Pemilihan legislatif serentak ini dapat dikatakan berjalan dengan relatif demokratis, aman, dan lancar. Bahkan, Pemilihan legislatif serentak ini menjadi pengalaman berharga bagi rakyat Indonesia dimana pemilihan lembaga eksekutif dan legislatif dilaksanakan pada hari yang sama.¹⁹

Pemilihan legislatif serentak tahun 2019 di Indonesia dianggap sebagai sebuah praktik demokrasi yang menarik perhatian dari negara-negara lain. Pelaksanaan yang sukses ini mencerminkan komitmen dan kemajuan dalam proses demokrasi di Indonesia. Keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia mampu menyelenggarakan Pemilihan umum dengan tingkat

¹⁹ Bawaslu RI. 2019. Laporan Kinerja 2019. Jakarta: Bawaslu Ri. (diakses pada tanggal 25 Juni 2023 pukul 19.30 WIB).

profesionalisme yang tinggi dan partisipasi yang aktif dari masyarakat. Kepatuhan terhadap prosedur dan aturan, partisipasi aktif dari partai politik, serta tingginya partisipasi masyarakat dalam memberikan suara mereka menjadi faktor kunci dalam keberhasilan Pemilihan legislatif serentak tahun 2019. Prestasi ini memberikan contoh positif bagi negara-negara lain dalam upaya memperkuat demokrasi dan membuktikan kemampuan Indonesia dalam menyelenggarakan proses pemilihan yang bebas dan adil.

Dalam Pemilihan legislatif serentak tahun 2019, Kabupaten Solok merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat dan ikut menyelenggarakan pemilihan serentak. Pemilihan legislatif DPRD Tahun 2019 wilayah Kabupaten Solok dibagi menjadi 4 (empat) Daerah Pemilihan (Dapil). Penetapan Dapil ini bertujuan untuk memastikan representasi yang adil dan merata dari berbagai wilayah di Kabupaten Solok dalam anggota DPRD yang terpilih. Setiap Dapil memiliki calon-calon legislatif yang mewakili dan mencalonkan diri untuk mewakili wilayah tersebut di DPRD Kabupaten Solok. 4 (empat) Dapil beserta jumlah alokasi kursi DPRD sebagai berikut:



Tabel 1.2
Dapil Pemilihan legislatif Kabupaten Solok Tahun 2019

Nama Dapil	Wilayah Dapil	Jumlah Kursi
Solok 1	Kubung, IX Koto Sungai Lasi, Gunung Talang	11
Solok 2	X Koto Singkarak, X Koto Di atas, Junjung Sirih	6
Solok 3	Tigo Lurah, Bukit Sundi, Danau Kembar, Lembang Jaya, Payung Sekaki	9
Solok 4	Lembah Gumanti, Hiliran Gumanti, Pantai Cermin	9
TOTAL		35

Sumber: Data Sekunder Diolah Peneliti Pada 2023

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, wilayah Dapil 2 terdiri dari tiga kecamatan, yaitu Kecamatan X Koto Singkarak, Kecamatan X Koto Di atas, dan Kecamatan Junjung Sirih. Pada Dapil 2, terdapat alokasi sebanyak 6 kursi yang disediakan untuk calon anggota DPRD Kabupaten Solok pada Pemilihan legislatif tahun 2019. Menariknya Kecamatan Junjung Sirih, terdiri dari dua nagari yaitu Nagari Paninggahan dan Nagari Muaro Pingai, merupakan daerah pemilihan yang termasuk dalam Dapil 2 dan ikut memperebutkan 6 kursi yang telah disediakan tersebut. Dengan demikian terjadi persaingan ketat pada Dapil 2 karena mencakup tiga kecamatan yang ada di Kabupaten Solok. Calon anggota DPRD Kabupaten Solok dari Dapil 2 bersaing untuk memenangkan 6 kursi yang tersedia pada Pemilihan legislatif tahun 2019. Pemilihan ini menjadi penting karena mempengaruhi perwakilan dan partisipasi dari masyarakat di wilayah Dapil 2 dalam lembaga legislatif Kabupaten Solok.

Calon legislatif DPRD yang berada di Dapil 2 memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan satu dari enam kursi yang akan diperebutkan di Dapil 2. Maka butuh soliditas dan entitas dari para Calon legislatif serta tim pemenang dalam memobilisasi masyarakat agar memilih mereka. Agar kehadiran kandidat dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat, mereka harus bisa menguasai sumber daya politik yang ada pada tiap-tiap daerah hingga tingkat paling rendah yaitu tingkat Nagari/Desa. Salah satu sumber daya politik yang perlu dikuasai adalah Calon legislatif adalah para elit lokal yang ada di daerah tersebut. Jika ingin menguasai basis masa pemilih yang kuat di suatu nagari/desa, maka Calon legislatif harus mampu melakukan pendekatan dengan elit lokal yang ada di

daerah tersebut, sebagai pihak yang akan memfasilitasi proses kedekatan Calon legislatif dengan pemilih.

Pada hari Rabu, tanggal 17 April tahun 2019, telah dilaksanakan Pemilihan legislatif di Kabupaten Solok. Dalam pemilihan tersebut, terhitung sebanyak 35.187 orang telah memberikan suara dari total 51.509 orang pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Dapil 2.²⁰ Berikut hasil perolehan suara Calon legislatif yang berhasil terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Solok untuk periode 2019-2024 dari Dapil 2:

Tabel 1.3
Hasil perolehan suara calon yang berhasil terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Solok Tahun 2019 Dapil 2

No	Nama Calon	Partai	Kecamatan			Jumlah
			X Koto Singkarak	X Koto Di atas	Junjung Sirih	
1	Septrismen	Gerindra	1.672	60	25	1.757
2	Vivi Yulista Rahayu	Golkar	511	156	3	670
3	Armen Plani	Nasdem	69	32	2.129	2.230
4	Nazar Bakri	PKS	151	38	656	845
5	Ahmad Purnama	PAN	60	1.741	17	1.818
6	Dian Anggraini	Demokrat	1.365	17	5	1.387

Sumber : Data Sekunder KPUD Kabupaten Solok

Berdasarkan data hasil perolehan suara untuk Pemilihan legislatif DPRD Kabupaten Solok tahun 2019 Dapil 2, terdapat enam Calon legislatif yang terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Solok periode 2019-2024. Dua di antaranya

²⁰ Valoranews. 2019. Ini Calon legislatif Terpilih Dapil Kab Solok 2; Perebutan Jatah 6 kursi Ketat. <https://valoranews.com/berita/13125/ini-calon.legislatif-terpilih-dapil-kab-solok-ii-perebutan-jatah-6-kursi-ketat.html> (Diakses pada tanggal 25 Juni 2023 pukul 19.30 WIB).

merupakan Calon legislatif yang berasal dari Kecamatan Junjung Sirih. Armen Plani yang diusung oleh Partai Nasdem berhasil meraih 2.230 suara sah. Sementara itu, Nazar Bakri yang diusung oleh Partai PKS mendapatkan perolehan suara sebanyak 845 suara sah. Upaya dalam mendapatkan perolehan suara terbanyak yang terjadi di Kecamatan Junjung Sirih, sepuluh orang Calon legislatif yang berasal dari kecamatan tersebut berlomba-lomba untuk menarik simpati masyarakat guna memilih mereka pada proses pemungutan suara. Dari hasil proses pemilihan tersebut, berikut adalah perolehan suara masing-masing calon pada Pemilihan legislatif DPRD Kabupaten Solok di tingkat Kecamatan Junjung Sirih Tahun 2019:

Tabel 1.4
Hasil perolehan suara calon anggota DPRD dari Kecamatan Junjung Sirih
Pada Pemilihan legislatif Tahun 2019

No	Nama calon	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Suardi Syam	Gerindra	49
2	Nurhaida	PDI P	9
3	Nursian	Golkar	570
4	Armen Plani	Nasdem	2.129
5	Nasar Bakri	PKS	656
6	Alwis Dt Bungsu	Hanura	250
7	Dodi Hermen	Hanura	801
8	Harison Dt Rajo Mudo	Demokrat	372
9	Arlis Rusman	Partai Bulan Bintang	35
10	Edi Sumanto	PAN	6

Sumber: Data Sekunder KPU Kabupaten Solok

Dari hasil akhir perolehan suara pada Pemilihan legislatif DPRD Kabupaten Solok tahun 2019 di tingkat Kecamatan Junjung Sirih, terlihat jelas selisih perolehan suara yang signifikan antara masing-masing Calon legislatif. Armen Plani, Calon legislatif yang diusung oleh Partai Nasdem, berhasil menang telak dari para pesaingnya. Kemenangan yang diperoleh oleh Armen Plani dalam Pemilihan legislatif DPRD Kabupaten Solok tahun 2019 cukup mengejutkan. Hal

ini disebabkan dua Calon legislatif *incumbent*, yaitu Nazar Bakri dan Nursian justru tertinggal jauh dalam perolehan suara dibandingkan Armen Plani. Bahkan lebih mengejutkan lagi, Armen Plani merupakan sosok tokoh masyarakat yang baru berkiprah dalam ranah perpolitikan di Kabupaten Solok. Kemenangan telak Armen Plani menjadi fenomena menarik untuk diteliti, mengingat ini kemenangan pertama bagi calon pendatang baru di Kecamatan Junjung Sirih. Untuk melihat lebih lanjut perolehan suara Armen Plani di tingkat nagari, peneliti telah meng gambarkannya dalam tabel berikut:

Tabel 1.5
Hasil perolehan suara calon anggota DPRD dari Nagari Paninggahan
Pada Pemilihan legislatif Tahun 2019

No	Nama calon	Perolehan Suara Tingkat Nagari	
		Nagari Paninggahan	Nagari Muaro Pingai
1	Suardi Syam	45	4
2	Nurhaida	9	0
3	Nursian	554	16
4	Armen Plani	1.961	168
5	Nasar Bakri	620	36
6	Alwis Dt Bungsu	248	2
7	Harison Dt Rajo Mudo	361	11
8	Arlis Rusman	35	0

Sumber: Data Sekunder KPUD Kabupaten Solok

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPUD Kabupaten Solok pada tabel 1.5 di atas, terlihat jelas bahwa basis masyarakat yang memilih Armen Plani berada di Nagari Paninggahan dengan jumlah perolehan suara sebanyak 1.961 suara yang masuk. Setelah itu, disusul oleh Nazar Bakri di urutan kedua dengan jumlah perolehan suara sebanyak 620 suara. Selisih perolehan suara Armen Plani jauh dengan pesaingnya, sementara Calon legislatif lainnya hanya memperoleh suara yang lebih rendah. Kemenangan Calon legislatif di tingkat nagari dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: Pertama, keterlibatan dan kontribusi

sosial Calon legislatif. Kedua, reputasi dan integritas Calon legislatif. Ketiga, kualitas program dan visi misi Calon legislatif. Keempat, partai politik yang menjadi kendaraan Calon legislatif. Kelima, komunikasi pada saat kampanye. Keenam, kedekatan Calon legislatif dengan masyarakat. Terakhir, hubungan Calon legislatif dengan tokoh-tokoh elit lokal.

Peneliti awalnya melihat kemenangan dari Armen Plani tentu tidak terlepas dari *Track record* dirinya sendiri, berdasarkan jejak rekamnya Armen Plani merupakan salah satu tokoh yang dikenal banyak oleh masyarakat Paninggahan yang aktif berkecimpung di kegiatan sosial, ekonomi dan politik. Sifat-sifat tersebut terlihat dari keseharian Armen Plani yang suka membantu masyarakat yang tertimpa musibah, masuk rumah sakit, hingga kehadirannya ke rumah masyarakat yang meninggal dunia. Dalam proses mendapatkan data awal peneliti mendapatkan data awal bahwasanya kemenangan Armen Plani tidak sepenuhnya disebabkan oleh jejak rekamnya saja tetapi juga dari peran dan kedekatannya dengan orang-orang terkemuka yang ada di Nagari Paninggahan.²¹

“Pak Armen sangat dekat dengan warga Paninggahan, beliau selalu hadir disaat ada warga yang terkena musibah, beliau hadir ketika ada acara goro bersama, selalu hadir pada acara rapat pembangunan nagari, hingga banyaknya orang-orang yang mengajukan proposal kegiatan acara kepada pak Armen. Itulah yang menjadi alasan kenapa tokoh-tokoh penting Paninggahan meminta beliau untuk maju menjadi anggota dewan”

Salah satu bukti adanya hubungan kedekatan Armen Plani dengan tokoh-tokoh elit lokal di Nagari Paninggahan yaitu pada saat pertemuan bersama yang dihadiri oleh Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Paninggahan, ketua

²¹ Wawancara dengan Arpan Suhadi selaku ketua Paga Nagari Paninggahan pada tanggal 20 Juli Pukul 13.00 yang bertempat di aula Kantor Wali Nagari.

kelompok pengajian Nagari Paninggahan, Niniak mamak, dubalang adat, kelompok basurah adat, bundo kandung, pemuda nagari, dan perwakilan tokoh rantau yang bertempat di rumah salah tim sukses Armen Plani, Jorong Kampung Tengah, Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih pada hari Minggu 16 Desember 2018.



Sumber: Facebook Relawan Pemenangan Armen Plani

Gambar 1.1

**Dokumentasi Pertemuan Armen Plani
Bersama Tokoh-Tokoh Lokal Paninggahan**

Disamping kegiatan pertemuan bersama yang diadakan oleh tim sukses pemenangan Armen Plani, pernyataan kesepakatan dukungan terhadap Armen Plani juga dilakukan oleh ketua-ketua lembaga dan organisasi yang ada di tingkat lokal Nagari Paninggahan. Para ketua lembaga-lembaga lokal menyatakan mendukung penuh atas pencalonan Armen Plani untuk menuju DPRD Kabupaten Solok periode 2019-2014. Kebenaran atas pernyataan dukungan yang diberikan oleh para ketua lembaga tersebut sesuai dengan hasil wawancara untuk data awal

peneliti dengan ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKMM)

Junjung Sirih Jhoni Afrizal.²²

“Berdasarkan hasil pertemuan antara Armen Plani dengan tokoh masyarakat dan ketua lembaga-lembaga yang ada Nagari Paninggahan yang bertempat di rumah H. Ujang di Jorong Parumahan, bahwasanya para ketua lembaga yang hadir saat itu meminta kesediaan Armen Plani untuk ikut maju mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kabupaten Solok dengan alasan Armen Plani ini telah banyak berbuat untuk masyarakat dan nagari, para tokoh-tokoh masyarakat juga menyatakan kesiapan untuk mengajak lembaga-lembaga lain yang ada di Nagari Paninggahan, mari bersama-sama mendukung Armen Plani hingga terpilih menjadi ketua DPRD Kabupaten Solok.”



Sumber: Facebook Relawan Armen Plani

Gambar 1.2

Dokumentasi Pernyataan Dukungan Elit Lokal Paninggahan Terhadap Armen Plani

²² Wawancara dengan Jhoni Afrizal selaku Ketua LKAAM Junjung Sirih pada tanggal 25 Juli Pukul 20.00 yang bertempat di Kediaman beliau di Paninggahan.

Setiap bagian dari elit lokal Nagari Paninggahan berkontribusi dengan peran dan fungsinya masing-masing untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mengantarkan Armen Plani menuju posisi anggota DPRD Kabupaten Solok. Peneliti berasumsi disamping faktor *track record* dan rekam jejaknya, kemenangan Armen Plani juga tidak terlepas dari peran dan kolaborasi elit lokal Nagari Paninggahan dalam memobilisasi masyarakat untuk memilih Armen Plani. Hal hasil, Armen Plani berhasil mencatatkan kemenangan besar seperti yang dikehendaki oleh para elit lokal yang berperan membantu memenangkan Armen Plani di Nagari Paninggahan. Sehingga peran dan dukungan dari masing-masing elit lokal dalam mempengaruhi jalannya proses politik praktis dalam Pemilihan umum.

Terkait dengan hal itu, maka yang jadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran yang dilakukan elite lokal dalam memenangkan Armen Plani pada Pemilihan legislatif DPRD Kabupaten Solok tahun 2019?
2. Apa saja alasan-alasan yang mendorong elite lokal Nagari Paninggahan mendukung kandidat pendatang baru Armen Plani daripada dua kandidat petahana yang telah memiliki pengalaman dalam pemilihan legislatif DPRD Kabupaten Solok sebelumnya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah peneliti kemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan yang mendorong elit lokal Nagari Paninggahan ikut berperan serta mendukung Armen Plani pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas diskursus sosial politik dalam kajian politik lokal pada Pemilihan legislatif.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian lanjutan sehingga bisa selalu dikembangkan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi wawasan baru bagi mahasiswa dan masyarakat umum yang tertarik mengenai studi tentang fenomena elit dalam politik lokal.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi bagi para Calon legislatif dan para tim sukses dalam melihat bagaimana peran elit lokal dalam Pemilihan umum.

